

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia adalah kementerian dalam pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Tugas utama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia salah satunya yaitu untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara dalam rangka terwujudnya Infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal dalam mendukung Indonesia yang lebih maju. Sangat diharapkan dengan adanya pengadaan barang diharapkan agar fungsi dari kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat terwujud dengan baik sesuai dengan fungsi yang ada.

Prosedur harus diperhatikan oleh setiap perusahaan mau itu perusahaan konvensional maupun pemerintah, setiap uraian pekerjaan harus sesuai dengan prosedur yang berlaku, dengan adanya prosedur kerja yang baik akan menghasilkan hasil yang baik, prosedur juga ditujukan agar terciptanya sistematis dalam bekerja agar tercapainya tujuan dari organisasi.

Pengadaan barang atau jasa dalam suatu instansi komersial maupun pemerintah memiliki prosedur dari mulai perencanaan, penyeleksian barang, sampai barang tersebut dicairkan oleh bagian pengadaan barang. dalam suatu instansi pemerintah atau perusahaan swasta pengadaan barang/jasa sangat mempengaruhi proses jalannya suatu instansi swasta maupun pemerintah dan keberhasilan suatu perusahaan, mendapatkan suatu barang atau jasa hasil yang maksimal harus melalui pengadaan barang terlebih dahulu. Keputusan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah pengganti Keputusan Presiden yang lama yaitu Keputusan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang pedoman tata cara pengadaan barang/jasa pemerintah, merupakan upaya untuk membangun kembali landasan implementasi kebijakan pengadaan barang pemerintah sebagai untuk meningkatkan efisiensi, semangat berkompetisi serta

pemberdayaan masyarakat yang profesional. Pengadaan barang bagi suatu instansi pemerintahan maupun swasta sangat dibutuhkan untuk menunjang kinerja agar terciptanya efisiensi maupun efektifitas dalam bekerja.

Pengadaan barang/jasa pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) yang bersumber dari pajak dan pendapatan pemerintah. Cara yang digunakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam pengadaan barang atau jasa yaitu melalui swakelola, lelang, langsung. Swakelola dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang penyelenggaraan pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain, dan/atau kelompok masyarakat, lelang yaitu metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat., dan metode langsung dilakukan oleh Pejabat Pengadaan dengan cara membeli barang atau membayar jasa secara langsung kepada penyedia barang/jasa, tanpa melalui proses lelang atau seleksi. Pengadaan langsung pada hakikatnya merupakan jual beli biasa dimana antara penyedia yang memiliki barang/jasa untuk dijual dan Pejabat Pengadaan yang membutuhkan barang/jasa terdapat kesepakatan untuk melakukan transaksi jual-beli barang/jasa dengan harga yang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut ada tiga macam bukti transaksi dalam pengadaan langsung yakni bukti/nota pembelian, kwitansi pembelian dan SPK.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Mempunyai pedoman khusus prosedur pengadaan barang, namun terkadang apa yang sudah diatur dalam pedoman tersebut tidak sesuai atau ada kekurangan dari alur yang seharusnya terjadi, Berdasarkan penjelasan diatas bahwa pengadaan barang/jasa merupakan faktor yang sangat penting bagi kementerian dalam menjalankan segala jenis kegiatan, maka dalam Praktek Kerja Lapangan yang dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maka penyusun tertarik untuk meninjau pengadaan barang

prosedur pengadaan barang pada bagian hukum dan komunikasi publik Bina Marga.

I.2 RuangLingkup

Ruang lingkup dari penulisan tugas akhir ini sesuai dengan kegiatan Praktek Kerja Lapangan adalah untuk mengetahui prosedur pengadaan barang mulai dari perencanaan sampai kepada pembayaran yang ada di bagian Hukum dan Komunikasi publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

I.3.Tujuan

Berikut adalah beberapa tujuan penyusun dalam mengerjakan Tugas Akhir dan menjalankan Praktik Kerja Lapangan, berikut tujuannya :

a. Tujuan Umum

tujuandaripenulisantugasakhir iniadalahuntukmemenuhisalahsatusyaratke lulusan Diploma Tiga (D.III) pada jurusan Akuntansi di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta sekaligus mengenalkan mahasiswa dengan dunia kerja sehingga meningkatkan kompetensi mahasiswa sesuai dengan bidang jurusannya.

b. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penulisan Laporan Tugas Akhir ini yaitu mengetahui Prosedur pengadaan barang dari Pembuatan HPS sampai dengan pembuatan berita acara

I.4.Sejarah Berdirinya Kementerian

Tanggal 3 Desember merupakan hari yang punya "Makna Khusus" bagi warga Departemen Pekerjaan Umum. Karena pada tanggal tersebut lima puluh tujuh tahun yang lalu terjadi peristiwa bersejarah. Gugur tujuh orang karyawan yang berjuang mempertahankan markas Departemen PU di Kota Bandung yang dikenal sebagai "Gedung Sate". Peristiwa ini kemudian dikenang dan diperingati sebagai HARI KEBAKTIAN PEKERJAAN UMUM.

Gedung V & W ini dipertahankan mati-matian sampai titik darah penghabisan oleh para pemuda/ pegawai Departemen PU. Karena mereka sadar,

bahwa gedung tersebut pada waktu itu dipergunakan sebagai kantor Pusat Departemen

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia diproklamkan, para pemuda pegawai Departemen Pekerjaan Umum tidak mau ketinggalan dengan pemuda-pemuda lainnya di kota Bandung. Mereka mempersiapkan diri dalam menghadapi segala kemungkinan yang sekiranya akan dapat merintangi serta mengganggu kemerdekaan yang telah diproklamasikan.

Jiwa dan semangat perjuangan yang menyala-nyala dari para patriot muda ini kemudian dihimpun dan disalurkan dalam suatu gerakan yang teratur dalam bentuk organisasi dengan nama gerakan Pemuda PU.

Gedung Sate, telah berhasil diambil alih oleh gerakan pemuda PU dari tangan Jepang. Kewajiban mereka selanjutnya pada saat itu adalah mempertahankan dan memelihara apa yang telah diambil alih itu jangan sampai direbut kembali oleh musuh. Untuk dapat menyusun pertahanan yang kompak, maka gerakan pemuda ini lalu membentuk suatu seksi pertahanan yang dipersenjatai seperti granat, beberapa pucuk bedil dan senjata api lainnya hasil rampasan dari tentara Jepang.

Mulanya gerakan pemuda ini hanya menghadapi sam kekuatan lawan. Yaitu tentara Jepang. Namun menjelang akhir bulan September 1945, di Tanah Air ini mulailah mengalir tentara Sekutu yang katanya ditugaskan untuk menjaga keamanan dan menyelesaikan tawanan perang akibat bertekuk lututnya Jepang pada Sekutu.

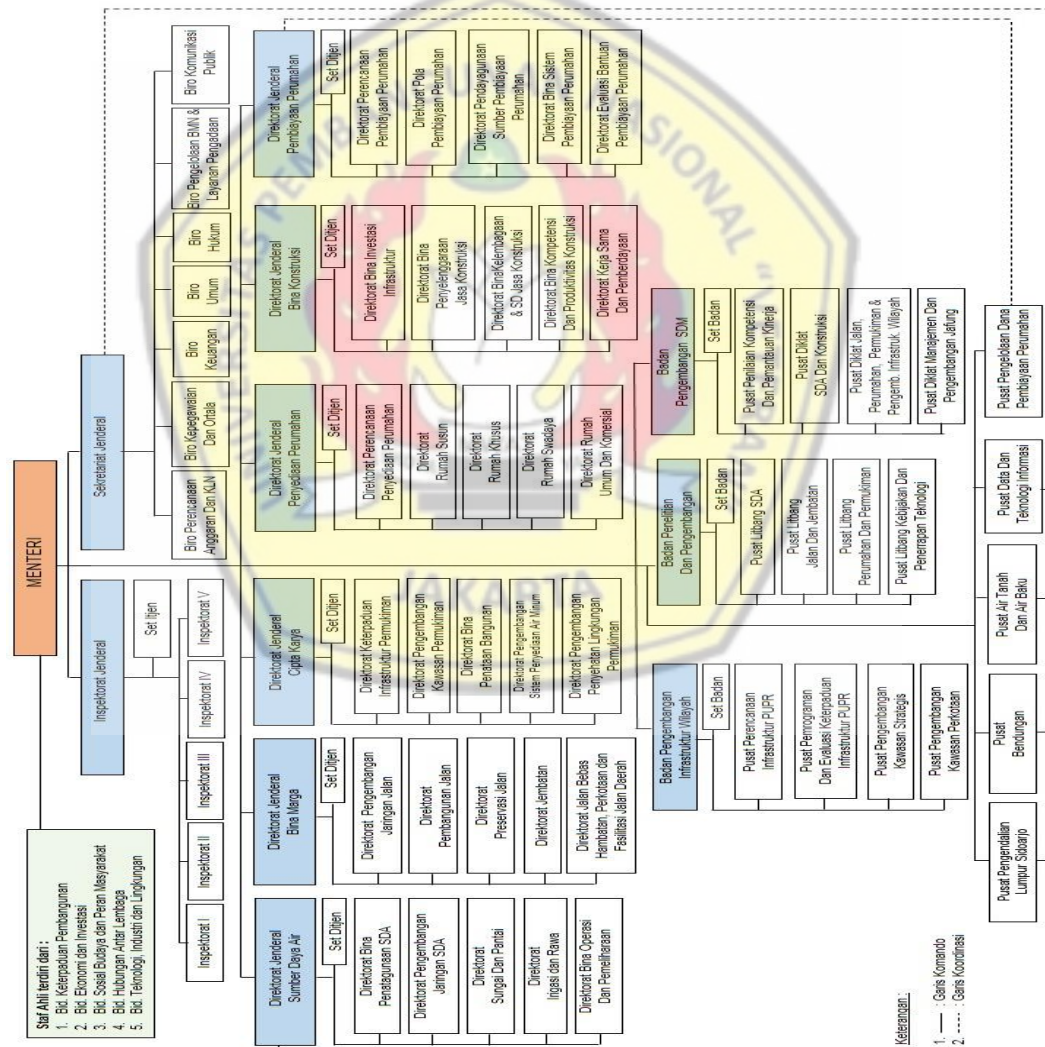
Sumpah Setia

Tepatnya tanggal 4 Oktober 1945, kota Bandung dimasuki tentara Sekutu yang di ikuti oleh serdadu Belanda dan NICA. Sejak saat itu suasana kota Bandung menjadi semakin tidak aman. Sejak itu pula gerakan pemudapejuang harus berhadapan dengan tentara Jepang dan tentara Sekutu, Belanda dan NICA.

Dengan semakin gawatnya situasi pada waktu itu, para pegawai dari Kantor Pusat Dep. PU dibawah pimpinan Menteri Muda Perhubungan dan Pekerjaan Umum. Ir Pangeran Noor pada tanggal 20 Oktober telah mengangkat Sumpah Setia Kepada Pernerintah Republik Indonesia.

Hampir setiap hari kantor Departemen Perhubungan dan Pekerjaan Umum dikacau oleh tentara Sekutu/Belanda/NICA, akibatnya para pegawai tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan tenang. Oleh karena itu, pada mulanya semua pegawai Departemen Perhubungan dan Pekerjaan Umum diperkenankan untuk tidak masuk kantor selama situasi belum aman. Kecuali para pegawai yang memang disertai barang-barang milik negara yang ada di dalamnya. Tugas yang berat ini mereka terima sebagai suatu kewajiban yang mulia yang akan dilaksanakan dengan taruhan jiwa dan raga.

I.5. Struktur Organisasi



Sumber: <https://www.pu.go.id/article/54/struktur-organisasi>

Gsmbar 1 Struktur Organisasi



Sumber: <https://www.pu.go.id/article/54/struktur-organisasi>

Gambar 2 Struktur Organisasi

Departemen-departemen yang ada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang memiliki fungsinya masing-masing termasuk Direktorat Jendral Bina Marga memiliki tugas pokok dan fungsi pokok mencakup :

Tugas Pokok :

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Pokok:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan nasional;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan konektivitas yang menjadi prioritas nasional;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan jalan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan jalan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan jalan;
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jendral Bina Marga; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Adapun penulis ditempatkan di Direktorat Jendral Bina Marga Divisi Hukum dan Komunikasi Publik yang merupakan bagian dari Sekretariat Direktorat Jendral Bina Marga.

Di bawah Sekretariat Direktorat jendral Bina Marga ada beberapa departemen, yaitu:

Sekretariat Direktorat Jenderal

- a. Bagian Kepegawaian, Organisasidan Tata Laksana
- b. Bagian Keuangan dan Umum
- c. Bagian Hukum dan Komunikasi Publik
- d. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara

Kemudian untuk lingkup yang lebih kecil, berikut adalah uraian tugas pokok dan produk pokok di divisi-divisi yang ada di bawah Sekretariat Jendral Bina Marga

- a. Bagian Kepegawaian, Organisasidan Tata Laksana :
Tugas Pokok :
Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jendral Bina Marga.
- b. Bagian Keuangandan Umum
Tugas Pokok :
Melaksanakan Pengelolaan urusan administrasi keuangan, tatausaha dan rumah tangga di lingkungan Direktorat Jendral Bina Marga.
- c. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara
Tugas Pokok:
Melaksanakan pengelolaan administrasi dan akuntansi Barang Milik Negara, leger jalan nasional dan jalan tol
- d. Bagian Hukum dan Komunikasi Publik
Tugas Pokok :
Melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitas iadvokasi hukum dan pemberian pertimbangan hukum serta penyelenggaraan komunikasi publik

I.6. Kegiatan Kementerian

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 15/PRT/M/2015. Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman bagian dari Badan Litbang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Tugasnya adalah melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang perumahan dan permukiman.

- a. Selanjutnya, penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang perumahan dan permukiman;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pelayanan uji laboratorium dan lapangan, sertifikasi, inspeksi, kalibrasi, dan advis teknis di bidang perumahan dan permukiman;

- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil penelitian dan pengembangan di bidang perumahan dan permukiman;
- d. pelaksanaan urusan peningkatan kapasitas sumber daya manusia penelitian dan pengembangan di bidang perumahan dan permukiman;
- e. pelaksanaan pengelolaan sarana kelitbangan;
- f. pelaksanaan urusan keuangan, ketata usahaan, dan umum;
- g. penyiapan penyusunan standar dan pedoman ; dan
- h. pelaksanaan diseminasi dan kerja sama penelitian dan pengembangan di bidang perumahan dan permukiman.

I.7. Manfaat

Manfaat dari Praktek kerja Lapangan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah:

- a. Mengetahui Proses Penyusunan yang meliputi pengadaan barang kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat
- b. Mempraktekan teori yang telah diterima pada saat perkuliahan.
- c. Pengetahuan prosedur pengadaan barang dalam sebuah organisasi sebuah organisasi.